

**ALASAN UNITED KINGDOM MENGIJINKAN OPERASIONAL ISLAMIC
BANKING ERA KEPEMIMPINAN TONY BLAIR**

JAVIER ASHAR

20120510441

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

azharjavier@gmail.com

Abstract

Being the first Islamic Bank authorized by Financial Services Authority (FSA) in 2004, Islamic Bank of Britain (IBB) is one important benchmark of the Islamic economic system's first growth outside the Middle East region or Islamic states. Since then, United Kingdom experienced various significant developments in economic environment such as the decrease in inflation, the decrease in unemployment rate and the inflow of various form of investments from Middle East and Islamic states. This phenomenon is rather unique because United Kingdom is not principally practicing Islamic economic system and instead, practicing Liberal-Capitalist economic system which has very opposite view compared to the Islamic one. This research employs a qualitative method using secondary datas (scientific books, journals, articles, quotes from research result, mass media, social media, and other documents needed) in it's process to identify any factors causing United Kingdom in the era of Tony Blair to give permission on the operational of Islamic Bank of Britain as the first Islamic bank in United Kingdom. This research showed that there is an influence from the pressure of Muslim society to establish an Islamic bank that can accommodate their needs for financial services without having to sacrifice their beliefs. On the other hand, a surplus in liquidity in the Middle East region and oil-exporting countries that must be captured at the time provided a major support for the government to execute the policy of authorizing Islamic banking operations in the United Kingdom.

Keywords: Islamic banks, United Kingdom, pressure, the Muslim community, surplus liquidity

1. PENDAHULUAN

pada tahun 2004 FSA (*Financial Services Authority*) secara mengejutkan melegalkan operasional IBB (*Islamic Bank of Britain*) yang merupakan bank swasta Islam pertama di UK dengan modal awal dari beberapa investor Timur Tengah dan muslim United Kingdom¹. Dalam prosesnya IBB mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan memicu perkembangan kehadiran perusahaan – perusahaan sejenis. Hingga saat ini United Kingdom diklaim sebagai Negara Barat paling maju terkait pemberdayaan Perbankan Islam dan tercatat mempunyai 5 Bank yang menerapkan Syariah secara penuh, disamping 17 firma khusus muslim dari 17 institusi ternama di UK seperti Barclays, RBS dan Lloyds Banking Group. Aset sebesar £12 milyar yang dimiliki oleh institusi-institusi syariah diatas bahkan dikabarkan mengungguli aset-aset serupa yang dimiliki oleh beberapa Negara Muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Turki dan Mesir. Terlepas dari fakta tersebut, kebijakan untuk mengizinkan operasional IBB di United Kingdom sendiri merupakan suatu peristiwa yang menarik dan kontroversial karena selain merepresentasikan sistem ekonomi Islam, sistem tersebut juga bertentangan dengan sistem ekonomi liberal-kapitalis yang dianut oleh United Kingdom.

Secara prinsip, hal paling fundamental yang menjadi pertentangan antara dua sistem ekonomi tersebut adalah masalah otoritas dan peraturan terkait hal-hal yang *legitimate* di dalamnya. Dalam masalah otoritas, Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam menjadikan Tuhan (Allah) dengan Hukum Syariah yang diciptakanNya sebagai otoritas tertinggi dan tidak mengakui otoritas yang lain. Disisi lain, Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis menjadikan mekanisme pasar sebagai otoritas tertinggi. Dengan begitu Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam tidak akan mengakui legitimasi hukum dan peraturan pemerintah. Hal tersebut menakutkan sebab dapat membuat Institusi-Institusi Keuangan Islam sulit dikontrol.² Kedua sistem ekonomi tersebut juga bertentangan dalam apa yang dapat dianggap baik ataupun buruk didalam sistem. Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam menganggap bahwa bunga atau *interest* (Eng.) adalah *Haram* dan tidak diperbolehkan, sama seperti tidak diperbolehkannya investasi terhadap makanan dan minuman *Haram* (Babi, alcohol, dll) serta industri pornografi. Hal tersebut jelas – jelas sangat bertentangan

¹ First Islamic Bank to Open in UK <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3547374.stm> diakses 3 Desember 2015

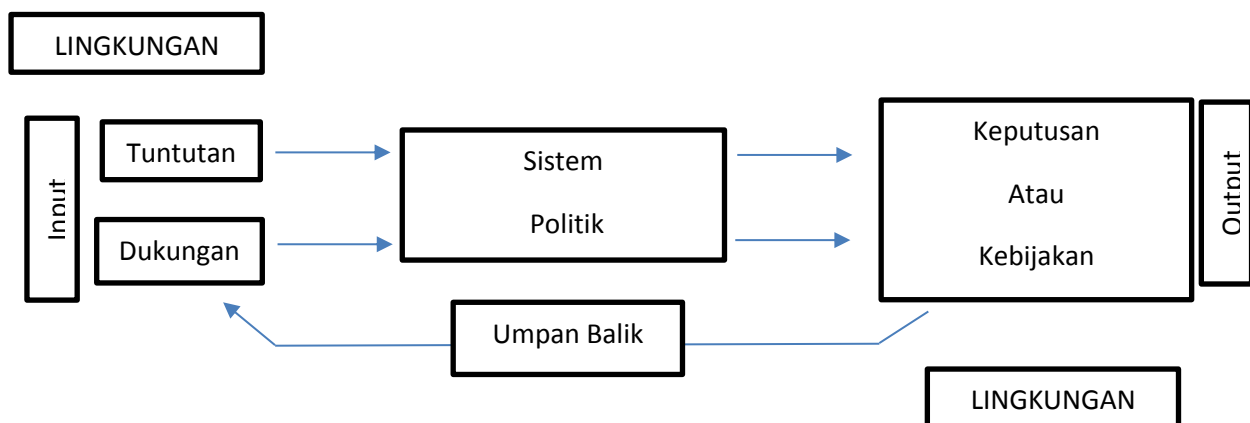
² <http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1141087/Britains-world-leader-sharia-banking--havent-grasped-sinister-dangerous-implications.html>

dengan Sistem Ekonomi Liberal – Kapitalis yang mana justru menerapkan mekanisme bunga sebagai asas fundamental dalam praktek keuangannya dan memperbolehkan investasi terhadap makanan dan minuman *Haram* maupun industri pornografi. Berdasarkan hal tersebut, beroperasionalnya Perbankan Islam sebagai ikon sistem ekonomi dan keuangan Islam di United Kingdom tidak muncul dengan serta merta, akan tetapi muncul melalui serangkaian fenomena dan berlapis-lapis prosedur pertimbangan dalam sistem pengambilan keputusan yang unik dibandingkan dengan sejarah munculnya Perbankan Islam di Asia maupun Timur Tengah.

2. MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAVID EASTON

Menurut Easton, Kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian fungsi Sistem Politik. Sistem Politik menurut Easton adalah bagian dari sistem sosial yang mengalokasikan nilai-nilai (berbentuk keputusan maupun kebijaksanaan) yang bersifat otoritatif lagi mengikat bagi seluruh masyarakat.³

David Easton menggambarkan rangkaian fungsi sistem politik dalam pembuatan keputusan dalam sebuah model berikut ini



Gambar 1 Model Pengambilan Keputusan David Easton

Pada dasarnya, Keputusan atau kebijakan suatu Negara adalah *output* yang dihasilkan dari *input* tertentu yang diolah oleh sistem politik. Tanpa *input*, sistem tidak akan berfungsi dan *output* tidak dapat diperoleh, begitu pun sebaliknya. Dalam perilaku sistem politik, *output* dapat menghasilkan konsekuensi – konsekuensi tertentu yang dapat menjadi *input*. Dalam kasus ini, *input* dapat berarti tanggapan sistem terhadap lingkungan sekitar tempat sistem tersebut bekerja. *Input* dalam model diatas dibagi menjadi 2, tuntutan dan dukungan.

³ Mas'ood, Mohtar. McAndrews, Colin (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hal xiii

Input – input inilah yang menjadi bahan mentah atau informasi yang diolah oleh sistem, juga energi yang dibutuhkan oleh sistem tersebut.⁴

Pertama, tuntutan adalah alasan mengapa suatu sistem politik terbentuk dalam masyarakat yang mana tidak semua kepentingannya dapat terpenuhi secara memuaskan. Bila tuntutan – tuntutan tersebut disalurkan lewat suatu usaha yang terorganisir secara khusus dalam masyarakat maka tuntutan – tuntutan tersebut dengan sendirinya telah menjadi input – input bagi sistem politik.⁵

Kedua, yaitu *input* berupa dukungan. Jika tuntutan adalah bahan mentah bagi sistem politik untuk diolah menjadi produk akhir (*output*), maka dukungan adalah energi bagi sistem politik untuk mengolah bahan mentah menjadi *output*. Dalam prakteknya, dukungan dapat berupa tindakan atau pandangan yang memajukan (mendukung) dan menghambat (menyatakan penolakan) sistem politik. Berdasarkan sasarannya, dukungan dibagi menjadi 3 : dukungan terhadap komunitas, rejim, dan pemerintah.⁶

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan oleh Easton dalam model pengambilan keputusan diatas, pada dasarnya fakta-fakta yang berpotensi menjadi tuntutan dan dukungan perlu untuk dipilah-pilah terlebih dulu dari seluruh proses, kegiatan dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan sistem politik di United Kingdom.

3. PROFIL EKONOMI UNITED KINGDOM MASA PEMERINTAHAN TONY BLAIR

Pembahasan tentang profil ekonomi United Kingdom masa pemerintahan Tony Blair akan dibagi menjadi 3 indikator : Sistem Ekonomi Kapitalis dan penerapannya di United Kingdom, Institusi dan regulasi perbankan di United Kingdom dan orientasi sistem ekonomi United Kingdom masa pemerintahan Tony Blair.

A. Sistem Ekonomi Kapitalis dan Penerapannya di United Kingdom

Sistem ekonomi kapitalis seringkali didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang membolehkan aktor – aktor individu ataupun aktor – aktor ekonomi lain selain Negara untuk memiliki dan mengolah aset sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, sementara *invisible hand* mengatur mekanisme dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan pola penawaran dan permintaan yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Adam Smith sebagai salah satu pemikir awal sistem ekonomi kapitalis, meyakini bahwa

⁴ Ibid. hal 9

⁵ Ibid

⁶ Ibid. hal 15

invisible hand tidak semestinya dicampuri oleh pemerintah karena perannya secara alami dapat mengoptimalkan pertumbuhan dalam masyarakat, sedangkan intervensi pemerintah dalam mekanisme ini hanya akan menghambat optimalisasi pertumbuhan tersebut. Secara keseluruhan, terdapat setidaknya 3 elemen utama yang menjadi ciri khas Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis, yaitu : sistem keuangan dan perbankan berbasis bunga, pasar bebas dan industri yang bersifat privat.⁷⁸ Sebagai salah satu pengikut pertama dari sistem ini, United Kingdom pernah tumbuh menjadi ekonomi terbesar di dunia serta tempat kelahiran demokrasi modern, Revolusi Industri, dan berbagai macam pasar keuangan yang merupakan produk aplikasi elemen mendasar dan ciri khas dari sistem ekonomi kapitalis yang telah disebutkan diatas.

Perwujudan kapitalisme dalam sistem ekonomi yang dijalankan oleh Blair dikuatkan oleh keputusannya melalui Menteri Keuangannya, Gordon Brown, untuk memberikan Bank of England kuasa penuh dalam menentukan *rate of interest* United Kingdom tanpa konsultasi dengan Pemerintah. Sebuah keputusan yang seolah meletakkan kestabilan ekonomi Negara ditangan kepemilikan privat yang tidak ada landasannya dalam Partai Buruh.⁹ Dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mencegah inflasi, Hal tersebut pada awalnya menuai banyak kritik, terlebih dari kalangan Partai Buruh itu sendiri. Walaupun menuai banyak kritik, Blair tetap mempunyai banyak program yang merepresentasikan pihak Partai Buruh seperti keputusan tidak bergabung dalam Eurozone, meningkatkan pajak dalam tataran yang rasional, memberlakukan *National Minimum Wage* (Upah Minimum Nasional) dan lain – lain yang menjadikan kesejahteraan sosial sebagai patokan utama dengan memanfaatkan potensi mekanisme pasar bebas, distribusi dana investasi dan pajak untuk peningkatan *public service* seperti edukasi, transportasi dan kesehatan.¹⁰

B. Institusi & Regulasi Perbankan di United Kingdom

Sebuah sistem tentunya membutuhkan sebuah lembaga eksekutif yang dapat menjalankan seluruh kebijakan yang telah diproduksi oleh sistem tersebut, serta dapat mengevaluasinya demi terwujudnya output yang stabil dan berkesinambungan. Dengan konsekuensi tersebut, hingga tahun 2013, terdapat 3 institusi utama yang mengatur regulasi

⁷https://www.polity.co.uk/keyconcepts/samples/Chapter_3_Capitalism.pdf

⁸ Scott, Bruce R. (2006). *The Political Economy of Capitalism*. Hal 1

⁹ <http://www.britannica.com/biography/Tony-Blair>

¹⁰<http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-2010-4/diamond.pdf> Diamond, Patrick (2010). *The British Labour Party*. FES. United Kingdom. Hal 90

perbankan dalam sistem ekonomi masa pemerintahan Blair, yaitu *Financial Services Authority (FSA)*, *Bank of England* dan *Treasury*.¹¹

Pertama, *Financial Services Authority (FSA)* adalah sebuah badan non-pemerintah yang independen yang diberikan kekuatan hukum oleh *Financial Services and Markets Act 2000*. FSA adalah perusahaan terbatas dengan jaminan dan dibiayai oleh industri jasa keuangan, bertanggung jawab untuk *Treasury* dan Parlemen.¹²

FSA mempunyai banyak tanggung jawab untuk mengatur regulasi jasa finansial yang ada di *United Kingdom*, termasuk sebagian besar layanan keuangan pasar, bursa dan perusahaan serta menentukan standar – standar yang harus dipenuhi sekaligus mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan jika standar – standar tersebut tidak dapat dipenuhi.¹³

Kedua, *Bank of England* adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1694 dan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Inggris. Parlemen, melalui undang-undang, telah memberikan kekuatan yang besar bagi Bank untuk mempromosikan kesejahteraan rakyat dengan menjaga stabilitas moneter dan keuangan.¹⁴ Dalam ranah yang lebih spesifik, *Bank of England* mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan public terhadap mata uang Nasional, menjaga nilai tukarnya sehingga masyarakat ataupun perusahaan dapat mengatur keuangannya secara lebih mudah dan aman, serta memastikan kestabilan finansial melalui pengawasan terhadap kepercayaan publik, institusi finansial, pasar, infrastruktur dan sistem secara keseluruhan.¹⁵

Ketiga, *Treasury* adalah Kementerian ekonomi dan keuangan pemerintah yang bertugas mempertahankan kontrol atas belanja publik, menetapkan arah kebijakan ekonomi Inggris dan bekerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Hingga tahun 2013, *Treasury* masih berkoordinasi dengan FSA sebagai tim pengontrol keadaan finansial dan ekonomi di *United Kingdom*.¹⁶

Beberapa tanggung jawab yang dibebankan kepada *Treasury* adalah belanja publik, pengawasan strategis dari sistem pajak Inggris dan memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan. Sedangkan hal yang menjadi prioritas *Treasury* adalah meningkatkan regulasi sektor keuangan agar lebih mudah bagi masyarakat untuk mengakses dan

¹¹ Reuters, http://www.economicsonline.co.uk/Business_economics/Banking+regulation.html

¹² <http://www.fsa.gov.uk/about/who>

¹³ <http://www.fsa.gov.uk/about/what/who>

¹⁴ <http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/governance/default.aspx>

¹⁵ <http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/onemission/default.aspx>

¹⁶ <https://www.gov.uk/government/organisations/hm-Treasury>

menggunakan layanan keuangan sehingga dengan demikian dapat menjamin pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.

C. Orientasi Sistem Ekonomi United Kingdom Masa Pemerintahan Tony Blair

Terdapat setidaknya 2 jenis orientasi sistem ekonomi di United Kingdom masa pemerintahan Tony Blair, yaitu orientasi untuk mencetak profit sebanyak mungkin untuk didistribusikan bagi kesejahteraan masyarakat dan orientasi distribusi pertumbuhan dalam sektor riil.

Dalam kebijakan – kebijakan dan program yang dicanangkan oleh Blair, orientasi untuk mencetak profit sebanyak mungkin direfleksikan oleh keputusan memberikan Bank of England wewenang lebih untuk mengatur *rate of interest* dan beberapa sektor finansial lain dengan harapan dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat dan memperkecil kemungkinan kerugian yang akan diderita. Keputusan tersebut dinilai sukses karena hingga 2007, inflasi, yang ditandai dengan *Consumer Price Index (CPI)* berada dalam rata – rata 1.5 persen selama 10 tahun dibandingkan dengan rata – rata 4.3 persen yang tercatat di 10 tahun sebelumnya. Dalam sub bab institusi dan regulasi, refleksi orientasi tersebut sudah sangat jelas terlihat di seluruh bagian visi, misi dan tujuannya.¹⁷

Sedangkan orientasi pertumbuhan dalam sektor riil dapat terlihat melalui program Blair untuk memajukan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan kuantitas serta kualitas *public service* seperti sekolah, bank, infrastruktur, transportasi maupun rumah sakit. Dalam regulasi perusahaan, sebuah kebijakan untuk mendorong peningkatan *liability* dalam keuangan.¹⁸ Begitupun dengan institusi dan regulasi ekonomi yang keseluruhannya, secara langsung maupun tidak langsung, bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor riil seperti perusahaan dan sumber daya manusia.

1. PERKEMBANGAN INSTITUSI PERBANKAN ISLAM

Demi memperoleh data yang memadai dan pertimbangan yang lebih objektif terkait masalah diijinkannya operasional perbankan Islam di United Kingdom, maka hal-hal yang berkaitan dengan definisi dan sejarah institusi perbankan Islam itu sendiri haruslah diketahui.

A. Definisi Perbankan Islam

Menurut definisi, sebuah Perbankan Islam adalah Perbankan yang mematuhi hukum Islam atau *Syari'ah*. Kata syariah dalam pengertian teknis sekarang digunakan untuk

¹⁷ Astle, Julian Alasdair Murray (2007). *Blair: the record, the legacy*. Centre Forum. Hal 10

¹⁸ibid. Hal 15

merujuk kepada sistem hukum sesuai dengan kode etik yang diajarkan dalam Quran dan Hadits. Dalam Perbankan Islam, prinsip – prinsip dasar *Syari'ah* diimplementasikan dalam 4 aspek transaksi komersial yang mendasar, yaitu penjualan, penyewaan, hadiah dan pinjaman.

Dasar ini kemudian diimplementasikan lagi kedalam berbagai transaksi tertentu yang lebih spesifik semisal deposito, jaminan, sewa tanah, yayasan wakaf (badan keagamaan atau amal), kemitraan dan lain-lain yang memainkan peranan penting dalam Finansial Islam dan dasar bagi praktek Perbankan Islam.¹⁹ Berikut adalah beberapa aturan yang wajib diberlakukan, mendapat dosa jika ditinggalkan dan menjadi identitas khusus sebuah Perbankan Islam yang membedakannya dari Bank-Bank Konvensional yang lain. Yaitu *Riba* tidak diperbolehkan dalam transaksi apapun; segala bentuk bisnis, usaha maupun investasi harus didasarkan pada aktifitas yang *Halal* (Legal, diizinkan); *Maysir* (perjudian) adalah *Haram*, seluruh transaksi diharuskan bebas dari segala macam bentuk *Gharar* (spekulasi dan ketidakjelasan yang tidak masuk akal); dan *Zakat* harus dibayarkan oleh bank untuk kemaslahatan umat dan masyarakat.

Seluruh aktivitas bank harus didasarkan pada standar – standar keislaman, dimana sebuah dewan *Syari'ah* diperlukan untuk mengawasi dan menjadi penasehat bagi bank atas kepatutan sebuah transaksi.²⁰ Dengan mengaplikasikan hal – hal tersebut, tujuan utama Perbankan Islam adalah untuk meminimalisir kerugian dan kerusakan yang terjadi dalam masyarakat yang dihasilkan dari pengaruh buruk kebiasaan transaksi yang tidak sehat dan mempromosikan serta mensosialisasikan nilai – nilai kebaikan didalamnya guna menciptakan kesejahteraan yang merata sebagai hasil dari masyarakat yang berasaskan kejujuran dan keadilan.²¹

B. Sejarah dan Perkembangan Institusi Perbankan Islam di Dunia Islam

Fase awal yang menandai perkembangan institusi Perbankan Islam dimulai dengan berdirinya Bank Islam lokal di Mesir pada tahun 1963. Bank tersebut dianggap oleh banyak peneliti sebagai bank pertama di dunia yang bebas bunga. Walaupun diakuisisi oleh pemerintah beberapa tahun setelahnya karena alasan politik.²² Tahun – tahun berikutnya

¹⁹ ibid

²⁰ ibid

²¹ Ibid hal. 46

²² Al-Marwyne 1985; Wilson 1983. Disitasi dalam Alharbi, Ahmad (2015). *Journal of Islamic Banking and Finance : Development of the Islamic Banking Sistem*. American Research Institute for Policy Development. Hal. 14

kemudian diisi oleh kemajuan dan keterlibatan para peneliti serta institusi – institusi dalam perkembangan Perbankan Islam seperti *Islamic Research Academy Al Azhar conference*, *the Finance Ministers of Islamic Countries conference* di Karachi tahun 1970, *International Conference on Islamic Economics* di Makkah tahun 1976 dan lain-lain. Dalam konferensi di Karachi, sebuah mosi untuk berdirinya Perbankan Islam Internasional dikemukakan oleh delegasi dari Mesir sedangkan delegasi dari Pakistan mengemukakan usulan untuk mendirikan persatuan internasional Perbankan Islam. Beberapa tahun setelah itu, institusi Perbankan Islam mengalami *booming*. Beberapa contoh dari Bank – Bank tersebut adalah *Faisal Islamic Bank* (Mesir, 1978), *Kuwait Finance House* (Kuwait, 1978), *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment* (Jordania, 1979), *Tadamon Islamic Bank* (Sudan, 1981) dan lain – lain yang sebagian besar masih beroperasi hingga kini.²³

Pada tahun 1977 terbentuklah *International Association of Islamic Banks* untuk mengatur koordinasi antar Perbankan Islam yang *booming* tersebut dan meningkatkan kualitas dan standarisasi pelayanan Perbankan Islam secara keseluruhan.²⁴ Sesuai dengan misinya, perkumpulan ini memberikan gambaran tentang pentingnya jaringan Perbankan Islam yang rapi, terstruktur dan professional. Kemudian pada tahun 1981 *International Institute of Islamic Banks and Islamic Economics* dibentuk sebagai respon untuk menyokong pertumbuhan Perbankan Islam yang semakin menggurita dan kebutuhan akan pegawai dengan kapabilitas yang sesuai standar dan mumpuni. Institut tersebut berperan menyuplai staf dan pegawai bagi Perbankan – Perbankan Islam yang mana belum dapat dilakukan oleh Universitas – Universitas Islam pada saat itu.²⁵

Dengan semakin intensnya perkembangan Perbankan Islam dan semakin dibutuhkannya *supervisor* guna mengawasi praktek Perbankan Islam maka *Supreme Supervisory Commission on Fatwa and Shariah* didirikan pada tahun 1983. Komisi ini mempunyai fungsi untuk menguji, memeriksa dan memberikan pendapat atas seluruh *fatwa* yang dikeluarkan oleh dewan pengawas dan komite *fatwa* masing – masing Perbankan Islam; memantau kegiatan seluruh bentuk Lembaga Perbankan Islam dan memastikan kepatuhan segala kegiatan tersebut terhadap prinsip – prinsip *syariah*; dan memberikan

²³ Abdeen & Shook 1984, hal. 167; Shehata 2006, hal. 18. Disitasi dalam Alharbi, Ahmad (2015). *Journal of Islamic Banking and Finance : Development of the Islamic Banking Sistem*. American Research Institute for Policy Development. Hal. 15

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid hal 16

opini hukum melalui perspektif *syariah* ketika diminta oleh dewan pengawas dan komite *fatwa* masing – masin Perbankan Islam.²⁶

Ketiga fenomena tersebut adalah fenomena – fenomena utama yang menandai perkembangan dan perubahan Lembaga – lembaga Perbankan Islam menjadi model Perbankan Islam yang telah dikenal hari ini. Hingga akhir tahun 2015, terdapat lebih dari 400 institusi berbasis keuangan Islam yang tersebar di lebih dari 30 Negara termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Iran, Mesir, Turki, Malaysia, Indonesia, United States of America dan juga United Kingdom. Dengan total aset mendekati 2 trilyun dollar dan rating pertumbuhan yang selalu 2 digit²⁷, lebih dari 300 institusi adalah bank dengan lisensi penuh, dan lebih dari 100 lainnya adalah institusi keuangan konvensional yang mempunyai cabang layanan keuangan Islam.²⁸

C. Perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom

Walaupun masih terdapat perbedaan pendapat oleh para ahli terkait awal mula perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom, sebagian besar sepakat bahwa perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom bermula pada kurun waktu antara tahun 1970an hingga 1980an²⁹. Pada kurun waktu tersebut banyak berdiri komunitas intelektual dan institusi pendidikan yang mengkaji tentang konsep ekonomi dan Perbankan Islam serta beberapa percobaan penerapan konsep *syariah* dalam firma – firma keuangan di United Kingdom yang memberikan sumbangsih cukup besar dalam membentuk pondasi Perbankan Islam. Dalam sejarahnya secara kronologis, Bank yang pertama kali menawarkan pelayanan berbasis *syari'ah* di United Kingdom adalah Bank Al – Baraka yang merupakan cabang dari perusahaan investasi Al – Baraka di Jeddah. Hingga tahun 1993 Bank Al – Baraka melayani investasi, pembiayaan properti dan hipotek sampai lisensi pelayanan perbankannya dicabut oleh Bank of England, walaupun pada akhirnya Al – Baraka tetap beroperasi sebagai perusahaan investasi³⁰.

²⁶ *ibid*

²⁷ KFH Research, 2013 and IFSB Stability Report, 2013. Warde, Ibrahim (2010). Disitasi dalam Belouafi, Ahmed; Chachi, Abdelkader (2014). *Islamic Finance in the United Kingdom : Factors Behind its Development and Growth*. Journal of Islamic Economic Studies, UK. Hal 47

²⁸ The Banker, 2015. *Special Report : Top Islamic Financial Institutions*. Financial Times Ltd, United Kingdom. Hal 9

²⁹ Belouafi, Ahmed; Chachi, Abdelkader (2014). *Islamic Finance in the United Kingdom : Factors Behind its Development and Growth*. Journal of Islamic Economic Studies, UK. Hal 47 dan Alharbi, Ahmad (2015). *Journal of Islamic Banking and Finance : Development of the Islamic Banking Sistem*. American Research Institute for Policy Development. Hal. 20

³⁰ Beberapa peneliti menyebutkan Bank Al – Baraka berdiri pada 1981 (Bekkin, 2007) dalam Alharbi, Ahmad (2015). *Journal of Islamic Banking and Finance : Development of the Islamic Banking Sistem*. American Research Institute for Policy Development. Hal. 20 dan tahun 1983 dalam Belouafi, Ahmed; Chachi,

Pada tahun 1995 Universitas Loughborough yang bekerjasama dengan Islamic Foundation United Kingdom menjadi Universitas barat pertama yang mengakui dan mengajarkan keuangan dan Perbankan Islam ditingkat master. Perkembangan ini, secara khusus mengundang banyak ketertarikan dan keinginan kerjasama dari banyak pihak, individu maupun institusi. Diantaranya adalah konferensi Universitas Loughborough dengan IDB (*Islamic Development Bank*) bersama dengan pemuka Bank of England Sir Eddie George untuk membahas kemungkinan perijinan operasional Perbankan Islam di United Kingdom agar dapat memfasilitasi masyarakat muslim disana³¹. Geliat kajian ekonomi dan Perbankan Islam setelahnya menunjukkan peningkatan dikampus – kampus; firma – firma keuangan mulai melirik produk – produk keuangan Islam sebagai varian produk mereka dan beberapa Negara asing – khususnya regional Timur Tengah – seperti Turki, Saudi Arabia dan Qatar menunjukkan ketertarikan yang meningkat dibanding sebelumnya. Hal ini merupakan kemajuan yang bagus karena menunjukkan peningkatan *awareness* dan pengetahuan tentang eksistensi Perbankan Islam, bagi masyarakat Muslim maupun Non Muslim sehingga menguatkan pondasi inisiasi Perbankan Islam di United Kingdom.

Pada tahun 2000, salah satu universitas terkenal di United Kingdom menjadi tuan rumah Konferensi Internasional ke-4 Ekonomi Islam (*4th International Conference on Islamic Economics*). Hal tersebut membuat United Kingdom menjadi Negara Eropa pertama yang mengadakan acara tersebut. Pada tahun yang sama pula, jumlah universitas yang menyediakan kuliah keuangan dan Perbankan Islam terus meningkat seperti Universitas Portsmouth, Loughborough dan Gloucester.

Tahun 2001 merupakan salah satu tahun yang krusial bagi perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom. Pada tahun ini perkembangan Perbankan Islam mengalami terobosan politik dan regulasi yang signifikan pasca diciptakannya sebuah *working group* tingkat tinggi yang beranggotakan perwakilan dari kota, pemerintah, dewan para penyedia dana hipotek (*Mortgages Lenders*), komunitas muslim dan FSA untuk mengkaji serta menguji hambatan – hambatan bagi perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom. Lewat kelompok ini pula untuk pertama kali muncul klausa “*Alternative Financial*” untuk

Abdelkader (2014). *Islamic Finance in the United Kingdom : Factors Behind its Development and Growth*. Journal of Islamic Economic Studies, UK. Hal 47

³¹ Belouafi, Ahmed; Chachi, Abdelkader (2014). *Islamic Finance in the United Kingdom : Factors Behind its Development and Growth*. Journal of Islamic Economic Studies, UK. Hal 49

ditambahkan dalam regulasi keuangan dan perpajakan agar tercipta sebuah iklim tanpa diskriminasi bagi para pemain ekonomi konvensional dan pelaku ekonomi Islam.

Pada tahun 2003, Pemerintah United Kingdom meluncurkan satuan tugas pertama untuk menjamin perkembangan sektor Perbankan Islam di United Kingdom, meningkatkan investasi masuk ke United Kingdom dan menguatkan ekonomi Negara. Dengan demikian, misi tersebut juga termasuk mempromosikan sektor Perbankan Islam kepada industri – industri besar maupun kecil, dalam maupun luar negeri, publik maupun swasta.

Tahun 2004 merupakan penanda kebangkitan aktifitas Perbankan Islam di United Kingdom dengan berdirinya IBB (*Islamic Bank of Britain*), yang pada saat itu merupakan Perbankan Islam pertama yang memberikan pelayanan penuh dalam seluruh produk Perbankan Islam dan tidak hanya terfokus pada *home financing* seperti bank – bank sebelumnya. Selain mendapatkan izin dan lisensi langsung dari FSA, IBB juga mendapatkan dukungan yang massif dari komunitas muslim di United Kingdom. Berdirinya IBB sendiri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan komunitas muslim United Kingdom akan transaksi ekonomi yang *syar'i*. Didukung dengan aliran dana yang besar dari kawasan Timur Tengah (seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi), IBB mengalami pertumbuhan yang pesat hingga 3 kali lipat pada 3 tahun pertama operasinya³².

Terpacu dengan potensi Perbankan Islam yang begitu menjanjikan, tahun – tahun setelah berdirinya IBB diwarnai dengan menjamurnya institusi – institusi, firma – firma maupun bank – bank yang membuka cabang ataupun menyediakan pelayanan perbankan berbasis syariah. Hingga tahun 2013 terdapat setidaknya 16 bank yang menyediakan pelayanan Perbankan Islam secara penuh maupun sebagian.³³

1. TUNTUTAN DAN DUKUNGAN DIBALIK IJIN OPERASIONAL PERBANKAN ISLAM DI UNITED KINGDOM

Melalui analisis *decision making process*, penulis akan mengurai *input* dibalik keluarnya keputusan untuk mengizinkan operasional Perbankan Islam di United Kingdom menjadi dua, faktor tuntutan internal dan dukungan, yang mana akan dipilah lagi sebagai berikut :

A. Desakan Masyarakat Muslim sebagai tuntutan utama bagi diijinkannya operasional Perbankan Islam di United Kingdom

³² Engzell, Christofer (2008). *Islamic Bank in the United Kingdom – Growth in the 21st Century*. Departement of Economic History, Uppsala University. Hal 13

³³ <http://www.globalbankingandfinance.com/list-of-islamic-banks-in-the-united-kingdom/>

Menurut Easton, sebuah tuntutan baru dapat menjadi *input* bagi sebuah Sistem Politik jika tuntutan tersebut telah bertransformasi menjadi sebuah isu. Sebuah tuntutan yang timbul tidak dapat secara tiba-tiba menjadi sebuah isu politik. Terdapat beberapa indikator yang membedakan antara tuntutan yang belum menjadi isu politik dan telah menjadi isu politik, yaitu : jumlah inisiator tuntutan yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat; waktu pengajuan tuntutan; keahlian politik inisiator tuntutan; akses saluran komunikasi; dll.³⁴ Berdasarkan indikator tersebut, terdapat setidaknya 3 faktor yang menyebabkan desakan Masyarakat Muslim dapat berkembang menjadi sebuah isu yang didengar oleh Sistem Politik, yaitu : Pengaruh jumlah populasi Masyarakat Muslim, fenomena *self exclusion* dan lobi *Muslim council of Britain* terhadap badan pemerintahan.

Masyarakat Muslim di United Kingdom merupakan sebuah bagian dari sistem politik dengan pengaruh yang cukup kuat, khususnya dalam memberi pengaruh bagi isu – isu yang berkaitan dengan Islam. Hingga akhir tahun 2011, populasi umat muslim tercatat sebagai 4,8% dari seluruh populasi di United Kingdom dengan 2,706,066 orang, meningkat hingga hampir dua kali lipat dari jumlah pada saat sensus pertama tahun 2001. Jumlah tersebut menjadikan Umat Muslim sebagai populasi terbanyak keempat di United Kingdom setelah Umat Kristiani (33,243, 175), *atheis* (14,097,229) dan ‘tidak menyebutkan agamanya’ (4,038,,032)³⁵. Dengan jumlah dan tingkat pertumbuhan yang signifikan tersebut, Umat Muslim merupakan sebuah bagian dari masyarakat yang mempunyai kekuatan dan peran besar jika dapat diorganisir.

Pada dasarnya, jumlah populasi Masyarakat Muslim di United Kingdom dan tingkat pertumbuhannya yang pesat mempunyai konsekuensi yang besar terhadap perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom karena dengan jumlah yang semakin besar, Masyarakat Muslim di United Kingdom mempunyai pengaruh ekonomi dan politik yang juga semakin besar sebagai sebuah kesatuan kelompok. Peningkatan jumlah dan pengaruh ini, disisi lain, dapat menuai perhatian lebih dari banyak institusi termasuk institusi pemerintahan, partai politik, perusahaan maupun institusi perbankan. Dengan begitu, Masyarakat Muslim sebagai sebuah kesatuan kelompok mempunyai jangkauan yang lebih luas dan kesempatan yang lebih besar untuk mengartikulasikan kepentingannya, terlebih

³⁴ Easton, David (1957) dalam Macridis, Roy C. Brown, Bernard E. (1996). *Perbandingan Politik*. Gelora Aksara Pratama. Hal 41-42

³⁵ Muslim Council of Britain’s Research & Documentation Committee (2015). *British Muslim in Numbers*. London, The Muslim Council of Britain.

terkait masalah kepercayaan seperti ijin pembangunan masjid, regulasi makanan *halal*, dan tentu saja, pendirian layanan Perbankan Islam.³⁶

Kedua adalah pengaruh fenomena *self exclusion* dalam membentuk artikulasi tuntutan. Menurut Hersi, *self exclusion* adalah salah satu dari dua sebab terjadinya *financial exclusion* atau keengganan maupun ketidakmampuan kelompok-kelompok tertentu untuk mengakses layanan finansial utama dalam suatu daerah atau Negara.³⁷ *Self exclusion* pada dasarnya adalah sebab pertama dari *financial exclusion* yaitu keengganan personal untuk mengakses layanan finansial disebuah negara karena perbedaan kepercayaan. Dengan alasan tersebut, layanan perbankan konvensional tidak akan pernah menjadi jalan keluar paling efektif untuk menanggulangi *financial exclusion* dalam kasus Masyarakat Muslim sebanyak apapun dibangun dan dikembangkan sebelum didirikan sebuah layanan finansial dan perbankan yang berbasis syariah³⁸. Hal ini merupakan sugesti spesifik bagi pemerintah dari artikulasi kebutuhan masyarakat Muslim akan perbankan Islam.

Ketiga adalah pengaruh lobi *Muslim Council of Britain* sebagai *interest group* masyarakat Muslim. Sebagai organisasi yang dibangun atas kerjasama dan koordinasi antar lembaga-lembaga Muslim dan seluruh individu Muslim yang berada di United Kingdom, *Muslim Council of Britain* adalah sebuah organisasi penyedia jalur-jalur politik bagi artikulasi kepentingan Masyarakat Muslim. Dalam hal ini, termasuk juga kepentingan Masyarakat Muslim akan tersedianya Perbankan Islam di United Kingdom. Beberapa usaha perwakilan artikulasi kepentingan masyarakat Muslim oleh *MCB* adalah melalui media elektronik³⁹ dan *lobbying* dalam tubuh pemerintahan. Menurut Chase, praktek *lobbying* yang terjadi dalam kasus perijinan operasional Perbankan Islam di United Kingdom adalah praktek yang *bottom-up*.⁴⁰ Kepentingan dari Masyarakat Muslim akan berdirinya Perbankan Islam di United Kingdom diinterpretasikan ulang oleh *Muslim Council of Britain* dan diartikulasikan secara lebih spesifik dan mendetail kepada badan pemerintahan yang berwenang.

³⁶ Chase, Anthony (2012). *Divergent Political Dynamics of Islamic Banking in Britain and France*. Thesis, The Department of Political Science, University of Michigan – Ann Harbor. Hal 38-39

³⁷ Warsame, Mohamed, Hersi (2009) *The role of Islamic finance in tackling financial exclusion in the UK*. Doctoral thesis, Durham University. Hal 21 - 22

³⁸ Ibid Hal 87 – 88

³⁹ The Muslim Council of Britain, 'Britain gives the green light to Islamic Banking' (25 August 2004) <http://mcb.org.uk/features/features.php?ann_id=449>

⁴⁰ Chase, Anthony (2012). *Divergent Political Dynamics of Islamic Banking in Britain and France*. Thesis, The Department of Political Science, University of Michigan – Ann Harbor. Hal 51

Hingga tahun 2004, *Muslim Council of Britain* telah menggandeng beberapa kelompok kerja pemerintah untuk merumuskan reformasi hukum yang legal bagi terwujudnya Perbankan Islam dan bahkan telah menerbitkan materi pendidikan tentang keuangan Islam bagi masyarakat non-Muslim. Di lain pihak, *HM Treasury*, *Financial Service Authority (FSA)* dan *Bank of England (BoE)* juga telah memunculkan indikasi untuk membahas isu tersebut dengan membentuk sebuah kelompok kerja bersama dengan *Muslim Council of Britain* dan institusi-institusi yang lain.⁴¹

Kelompok kerja tersebut mencapai titik keberhasilannya pada tahun 2003 ketika Sir Howard Davies, Chairman FSA, mengutarakan dukungannya dalam sebuah konferensi seputar Keuangan dan Perbankan Islam di Bahrain. Inti dari pidatonya adalah bahwasanya tidak ada keberatan maupun sanggahan dalam ide beroperasinya Perbankan Islam di United Kingdom jika Perbankan Islam terbukti mampu memenuhi persyaratan regulasi oleh *Financial Service Authority*. Menurutnya, United Kingdom mempunyai kepentingan yang jelas untuk memastikan Perbankan Islam dapat tumbuh subur didalamnya.⁴²

B. Surplus Likuiditas negara-negara Timur Tengah

Dalam dekade belakangan ini, kenaikan harga minyak telah mengakibatkan peningkatan pendapatan Negara – Negara eksportir dengan pesat. Sejak *oil boom* tahun 1979, para eksportir minyak telah mengalami peningkatan pendapatan yang drastis, ditahun 2002 hingga tahun 2006 keuntungan bahkan diklaim lebih dari 650 miliar US\$. Dengan pemasukan sebanyak itu, diperlukan penanganan yang juga intensif dan hati – hati terhadap likuiditasnya. Jika terlalu banyak diputar di Negara sendiri dengan kurs lokal, berpotensi membuat kurs mata uang lokal menjadi turun. Sama halnya jika hanya disimpan. Salah satu cara terbaik menangani surplus keuntungan ini adalah dengan melakukan *petrodollar recycling*.

Dalam prakteknya, harga minyak yang tinggi akan membuat daya beli Negara – Negara pengimpor minyak turun, sehingga arus pemasukan penjualan minyak bagi Negara – Negara eksportir minyak akan terancam berkurang. Namun jika Negara – Negara eksportir minyak menggunakan pemasukan tersebut untuk mengimpor barang ataupun jasa dari Negara – Negara importer minyak, berinvestasi maupun membuka deposito dan mengisi

⁴¹ ibid

⁴² Asmat, Shafaq (2014). *Islamic Finance in the Western World: Development, Legal Regulation and Challenges Faced by Islamic Finance in the United Kingdom*. *Journal of Islamic Banking and Finance* hal 99

kembali devisa mereka, maka hal tersebut dapat meningkatkan kembali daya beli Negara – Negara importer minyak sehingga dapat mengurangi efek melonjaknya harga minyak⁴³. Itulah ilustrasi dari proses *petrodollar recycling*.

Pada kenyataannya, petrodollar, terlebih yang berbentuk SWF menjadi ‘kacang goreng’ favorit dalam lingkup keuangan internasional hingga saat ini. Satu dekade terakhir, tingkat transaksi SWF secara menyeluruh naik hingga hampir 90% dari US\$3.259 trilyun ke US\$6.106 trilyun dengan 59% berasal dari penjualan minyak dan 41% non minyak. Berdasarkan regional Negara – Negara pemegang SWF terbesar adalah Asia dan Timur Tengah.

Namun terlepas daripada itu, terdapat kendala yang memberatkan bagi Negara-Negara eksportir minyak – yang mana sebagian besar adalah Negara Muslim di Timur Tengah – berupa sistem finansial dan perbankan konvensional Negara – Negara Barat yang berbasis bunga⁴⁴. Maka berdasarkan pertemuan kepentingan dan itikad untuk menghapus kendala dalam pertemuan kepentingan tersebut serta kepentingan untuk memenangkan persaingan menangkap arus modal yang deras dari Negara – Negara eksportir minyak tersebut, institusi finansial Islam mendapatkan celahnya untuk masuk dan kesempatannya untuk dipertimbangkan di Negara – Negara Barat. Satu pihak mendambakan kestabilan dan pihak lainnya mengejar keuntungan. Jika ditinjau melalui definisi dukungan menurut Easton, maka fenomena surplus likuiditas di Timur Tengah maupun di negara-negara eksportir minyak mempunyai dua implikasi yang dapat menjadi dukungan bagi keluarnya kebijakan perijinan operasional Perbankan Islam di United Kingdom. Pertama, adalah *preferensi* para investor untuk bertransaksi dalam bingkai Perbankan Islam yang mana belum ada di United Kingdom. Kedua, adalah masuknya surplus likuiditas dan investasi tersebut kedalam kas negara.

2. KESIMPULAN

Melalui fakta – fakta yang telah diteliti, penulis berkeyakinan bahwa terdapat dua macam faktor, tuntutan dan dukungan, yang mendasari keluarnya kebijakan perijinan bagi operasional Perbankan Islam di United Kingdom. Tuntutan bagi keluarnya perijinan operasional Perbankan Islam di United Kingdom berasal dari desakan Masyarakat Muslim untuk mendapatkan layanan Perbankan yang sesuai dengan Syariat. Desakan yang diwakili

⁴³ Ibid. hal 55

⁴⁴ Aldohni, Abdul Karim (2008). *The Emergence of Islamic Banking in the UK: A Comparative Study with Muslim Countries*. Arab Law Quarterly, BRILL. Hal. 194

oleh *Muslim Council of Britain* tersebut pada umumnya berisi proposal penanggulangan *financial exclusion* yang menimpa Masyarakat Muslim dengan mengizinkan Perbankan Islam beroperasi di United Kingdom secara legal. Sedangkan dukungan bagi perijinan operasional Perbankan Islam di United Kingdom berasal dari fenomena surplus likuiditas di Timur Tengah atau Negara – Negara eksportir minyak dan urgensi untuk menangkap surplus likuiditas tersebut.

3. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Mas'ood, Mohtar. McAndrews, Colin (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Jackson, Robert. Sorensen, Georg (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Macridis, Roy C. Brown, Bernard E. (1996). *Perbandingan Politik*. Penerbit Erlangga
- Haryanto, Drs (1982). *Sistem Politik : Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Chapra., D. U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- D, C. W. (2003). *Pengantar Politik Internasional : Sebuah Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Dr. Faried Wijaya M., M. D. (n.d.). *Lembaga - Lembaga Keuangan dan Bank : Perkembangan Teori dan Kebijakan*.
- Drs. H. Karnaen A. Perwataatmadja, M. &. (1992). *Apa dan Bagaimana Perbankan Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti PRima Yasa.
- Frank J. Fabozzi, F. M. (1999). *Foundation of Financial Markets and Institutions*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Karim., A. A. (2005). *Islamic Banking : Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

JURNAL

- Khan, M. A. (1999). *Islamic Economics and Finance*. London: Routledge.
- Mishkin, F. S. (n.d.). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*.
- Mitton, L. (n.d.). Financial inclusion in the UK. *Review of policy and practice*.

- Warde, I. (2000). *Islamic Finance in the global economy*. Edinburgh University press.
- Scott, Bruce R. (2006). *The Political Economy of Capitalism*.
- Crafts, Nicholas. *Britain's Relative Economic Performance, 1870–1999*. London: Institute of Economic Affairs.
- Diamond, Patrick (2010). *The British Labour Party*. FES. United Kingdom
- Faucher-King, Florence; Le Galès, Patrick; Elliott, Gregory (2010). *The New Labour experiment: change and reform under Blair and Brown*. Stanford, California, USA: Stanford University Press
- Hassan, M. Kabir, Lewis, Mervin K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing Inc. Cheltenham, UK.
- Christofer (2008). *Islamic Bank in the United Kingdom – Growth in the 21st Century*. Departement of Economic History, Uppsala University.
- Alharbi, Ahmad (2015). *Journal of Islamic Banking and Finance : Development of the Islamic Banking Sistem*. American Research Institute for Policy Development.
- Belouafi, Ahmed; Chachi, Abdelkader (2014). *Islamic Finance in the United Kingdom : Factors Behind its Development and Growth*. Journal of Islamic Economic Studies, UK.
- The Banker, 2015. *Special Report : Top Islamic Financial Institutions*. Financial Times Ltd, United Kingdom.
- Aldohni, Abdul Karim (2008). *The Emergence of Islamic Banking in the UK: A Comparative Study with Muslim Countries*. Arab Law Quarterly, BRILL.
- Chase, Anthony (2012). *Divergent Political Dynamics of Islamic Banking in Britain & France*. The Department of Political Science, University of Michigan.
- Priambodo, Yanuar (2012). *Kepentingan Ekonomi Politik Inggris dalam Menerapkan Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam (2004 - 2012)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.
- UKTI (2014). *UK Excellence in Islamic Finance*. UK Department of Trade and Investment.
- FSA (2007). *Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges*. Financial Service Authority, United Kingdom.
- Ansari, Humayun (2002). *Muslims in Britain*. Minority Rights Group International
- Bank of England (2015). *The Bank of England Act 1998, the Charters of the Bank and Related Documents*. Bank of England, United Kingdom

Asmat, Shafaq (2014). *Islamic Finance in the Western World: Development, Legal Regulation and Challenges Faced by Islamic Finance in the United Kingdom*. Journal of Islamic Banking and Finance

Ali, Dr. Sundas (2015). *British Muslim in Numbers*. Muslim Council of Britain's Research & Documentation Committee

INTERNET

<http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1141087/Britains-world-leader-sharia-banking--havent-grasped-sinister-dangerous-implications.html>

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3547374.stm>

http://www.economywatch.com/world_economy/united-kingdom/uk-economic-history.html

<http://www.economicshelp.org/blog/glossary/thatcher-economic-policies/>

<http://www.britannica.com/biography/Tony-Blair>

Reuters, http://www.economicsonline.co.uk/Business_economics/Banking+regulation.html

<http://www.fsa.gov.uk/about/who>

<http://www.fsa.gov.uk/about/what/who>

http://www.fsa.gov.uk/about/what/wedo/regulatory_approach_FSA.html

<http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/governance/default.aspx>

<http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/onemission/default.aspx>

<https://www.gov.uk/government/organisations/hm-Treasury>

<http://www.globalbankingandfinance.com/list-of-islamic-banks-in-the-united-kingdom/>

<https://www.thebalance.com/what-is-a-petrodollar-3306358>

<http://www.worldpropertyjournal.com/real-estate-news/dubai-uae/middle-east-real-estate-investors-report-2015-middle-east-property-investors-dubai-real-estate-investments-qatar-property-investments-cbre-9266.php>

<http://www.marketoracle.co.uk/Article44637.html>

https://www.polity.co.uk/keyconcepts/samples/Chapter_3_Capitalism.pdf